



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN
 Jl. Merapi, beran, Sleman KAB. SLEMAN
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
<http://pn-sleman.go.id>



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode 1 April 2025 sampai 30 Juni 2025

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

3,94 / 98,48%

Jumlah	100 RESPONDEN
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 60
	PEREMPUAN : 40
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0
	Diploma 2 : 0
	SD : 2
	Diploma 3 : 5
	SMP : 1
	S1 : 54
	SMU : 24
	S2 : 13
	Diploma 1 : 1
	S3 : 0
Pekerjaan	PNS : 6
	SWASTA : 24
	TNI : 0
	WIRAUSAHA : 9
	POLRI : 0
	TENAGA KONTRAK : 0
	LAINNYA : 61

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?	3,890
2. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP)	3,910
3. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?	3,920

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. 1. Indikator Hadiah/ tanda terima kasih

Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?

Dari hasil persepsi responden pada indikator Hadiah/ tanda terima kasih ini menunjukkan hasil Nilai capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi 3,890 masih dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sleman klas IA Sangat baik atau tidak pernah menerima maupun meminta tanda terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Namun secara angka merupakan bagian dari unsur yang terendah pertama sehingga tetap akan ditindaklanjuti dengan cara yaitu:

- Sosialisasi besaran Biaya pelayanan dengan publikasi Biaya perkara melalui kemudahan akses Website, Aplikasi Ampyang, Hot Line Service untuk mengakses biaya / tarif yang berlaku di Pengadilan Negeri Sleman, semua biaya layanan sesuai surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sleman. Sehingga Pengguna layanan tidak perlu memberikan tanda terimakasih karena mengetahui pelayanan yang tanpa dipungut biaya atau ada biaya resmi.

2. Indikator Transparansi pembayaran

Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP)

Dari hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil Nilai capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi 3,910 masih dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sleman klas IA Sangat baik dan bukti transaksi pembayaran sangat transparan. Namun secara angka merupakan bagian dari unsur yang terendah kedua sehingga tetap akan ditindaklanjuti dengan cara yaitu:

- Pemantapan sosialisasi terkait pemberian kwitansi/ bukti bayar atau rincian biaya pada setiap pelayanan sudah dapat dilakukan secara digital/ elektronik sesuai ketentuan serta ditambahi penjelasan langsung dari petugas di setiap layanan yang terkait biaya/ sisa panjar agar segera diambil.

3. Indikator Kesesuaian tarif resmi

Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?

Dari hasil persepsi responden pada indikator Kesesuaian tarif resmi ini menunjukkan hasil Nilai capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi 3,920 masih dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sleman klas IA Sangat baik atau sudah menerapkan tarif resmi tanpa ada tambahan biaya. Namun secara angka merupakan bagian dari unsur yang terendah ketiga sehingga tetap akan ditindaklanjuti dengan cara yaitu:

- Sosialisasi Prosedur, persyaratan harus jelas dan transparan, penjelasan / informasi tentang tambahan biaya panjar yang merupakan biaya resmi berdasarkan SK Ketua Pengadilan. Selain itu ada pembinaan dan pengetahuan secara berkala diberikan secara berjenjang oleh pimpinan.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

4 Juli 2025
Ketua Pengadilan Negeri